

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan perkotaan, pada dasarnya merupakan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota secara internal yang ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota. Perencanaan dan pembangunan kota serta perbaikan kota bersangkutan paut dengan hari depan perkotaan itu sendiri dan dalam konteks luas menyangkut negara, mengingat fungsi kota tidak lagi untuk penduduk kota itu sendiri tetapi erat hubungannya dengan penduduk daerah sekelilingnya. Dengan demikian sangat beralasan bila perencanaan pembangunan perkotaan dituangkan dalam suatu kebijaksanaan dasar yang dikaitkan dengan pembangunan wilayah dan interaksi kota desa secara seimbang dan harmonis.

Kota dengan berbagai variasi kegiatannya merupakan suatu hal yang bersifat dinamis. Mengingat sifat dinamisnya kota tersebut dan hubungannya dengan perkembangannya, maka dalam suatu kurun waktu tertentu dapat saja terjadi perkembangan baru yang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal yaitu perkembangan didalam wilayahnya sendiri maupun pengaruh dari luar seperti adanya pengaruh kebijaksanaan dan perekonomian wilayah, nasional ataupun global.

Dikaitkan dengan usaha pembangunan perkotaan yang berorientasi pada keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan sosial ekonomi untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, maka koordinasi pembangunan fisik

melalui penyiapan program pembangunan kota terpadu secara efektif dan efisien menjadi sangat pentingnya perannya dalam penataan kota. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan perkotaan dalam upaya memecahkan permasalahan perkotaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu antara berbagai sektor pembangunan.

Salah satu model perencanaan pembangunan bagi prasarana kota, maka diperlukan suatu dasar penataan terhadap tata ruang kota berdasarkan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya pembangunan melalui keterkaitan antar sektor dan sumber pemidanaan untuk pembangunan prasarana kota.

Rencana tata ruang terbagi dalam berbagai tingkatan kedalaman sesuai dengan wilayahnya. Pada tingkat nasional, rencana tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRN), yang sebelumnya dikenal dengan Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPPTR). SNPPTR ini berupa kebijaksanaan penataan ruang yang merupakan arahan jangka panjang menuju terbentuknya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang dikehendaki. RTRWN merupakan arahan lokasi bagi program-program pembangunan sektoral di tingkat nasional dalam jangka dua puluh lima tahun yang dijabarkan ke dalam program lima tahunan.

Untuk perencanaan wilayah tingkat Propinsi pemerintah menghendaki adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) pada setiap wilayah daerah propinsi. RTRWP merupakan penterjemahan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi ke dalam tata ruang. Rencana ini berdimensi waktu lima belas tahun dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program lima tahunan